



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 776/VI/2013

IV/JUNI 2013



Akhirnya DPR Setujui RUU APBN-P 2013 Melalui Voting



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JUNI 2013

Minggu keempat bulan Juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 17 Juni, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 2012 Tentang APBN 2013, dan beberapa kegiatan lain. Berikut rangkumannya:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Rapat Paripurna 17 Juni 2013

Rapat Paripurna 17 Juni dihadiri oleh 519 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Pimpinan Rapat adalah Ketua DPR, didampingi lengkap oleh 4 wakil ketua. Sebelum sampai agenda rapat, diberitahukan surat masuk dari Presiden, yaitu surat No. 311/DEN/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Kebijakan Energi Nasional, dan No. R-25/Pres/06/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal RUU tentang Perubahan Harga Rupiah. Sesuai dengan Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib, surat tersebut diserahkan pada Bamus untuk ditindaklanjuti.

Memasuki agenda paripurna, rapat mendengarkan Laporan Ketua Banggar DPR-RI yang disampaikan oleh Ir. Ahmadi Noor Supit mengenai hasil pembahasan RUU APBN-P 2013, terdiri dari proses pembicaraan tingkat

I RUU APBN-P 2013. Proses pembahasan dimulai 22 Mei 2013 dengan dilakukannya Raker Banggar dengan Menkeu, Men PPN/Kepala BAPPENAS, dan Gubernur BI, dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok RUU APBN 2013 dan pembentukan Panja dan Tim Perumus, yaitu Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer ke Daerah dan Tim Perumus draft RUU. Pada tanggal 15 Juni 2013, Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Menkeu/Men PPN/Kepala BAPPENAS dan Gubernur RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap draft RUU APBN-P 2013.

Sebelumnya dilakukan Raker Komisi VII Raker, Komisi XI untuk membahas asumsi dasar dalam RUU APBN-P TA



2013, dilanjutkan rapat kerja komisi-komisi dengan pasangan kerja masing-masing, untuk pembahasan perubahan RKA-K/L 2013. Badan Anggaran menerima Pimpinan Komisi IV DPD RI yang menyampaikan pertimbangan DPD RI terhadap RUU ini.

Pembahasan tingkat I atas RUU APBN-P TA 2013 di Badan Anggaran DPR RI, menyepakati:

Asumsi Ekonomi Makro : Pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar **6,3%**, **Inflasi** disepakati sebesar **7,2%**, **Nilai tukar rupiah** terhadap Dolar Amerika Serikat disepakati sebesar **Rp9.600,0/US\$, Tingkat suku bunga SPN 3 Bulan** disepakati sebesar **5,0%**, **Harga rata-rata minyak** mentah Indonesia disepakati sebesar **US\$108,0/barel**, **Lifting minyak** disepakati sebesar **840,0 ribu barel/hari**, **Lifting gas** disepakati sebesar **1.240,0 ribu barel setara minyak/hari**, **Lifting Minyak dan**

Gas disepakati sebesar **2.080,0 ribu barel/hari**.

Beberapa fraksi memberi catatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi antara lain: (1) Fraksi PDI Perjuangan meminta pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% dengan asumsi bahwa Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dalam APBN-P TA 2013, (2) Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah untuk (i) menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, (ii) mengurangi angka kemiskinan menjadi 21% mencakup kelompok kategori miskin dan hampir miskin/rentan, (iii) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Fraksi PKS menyatakan bahwa dalam pengajuan RUU



APBN-P TA 2013 oleh Pemerintah sudah menyertakan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga Fraksi PKS tidak dimungkinkan untuk membahas RUU APBN-P TA 2013 yang tidak menyertakan kebijakan tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi. Artinya, persetujuan angka Fraksi PKS tidak menunjukkan persetujuan kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk itu, jika Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, Fraksi PKS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P TA 2013 sebesar 6,5%, namun jika terjadi kenaikan maka Fraksi PKS setuju dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%.

Fraksi Partai Gerindra menyetujui pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P TA 2013 sebesar 6,3%-6,4%, dengan catatan (i) agar Pemerintah bersungguh-sungguh menurunkan gini ratio, (ii) agar Pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Nilai Tukar Petani, (iii) Setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan minimal 450 ribu lapangan kerja baru.

Terkait dengan catatan dan Pendapat Fraksi-fraksi, Pemerintah berpendapat bahwa selama tidak dalam target angka tertentu, Pemerintah akan sepakat. Namun demikian, Pemerintah akan memperhatikan semua indikator kesejahteraan.

Catatan Fraksi-fraksi atas Inflasi antara lain: (1) Fraksi PDI Perjuangan menyetujui inflasi sebesar 6,0%, (2) Fraksi PKS menyetujui inflasi sebesar 6,0% dengan tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, (3) Fraksi Partai Gerindra menyetujui inflasi sebesar 7,2% sebagai acuan dalam pembahasan. Besaran inflasi menurut Fraksi Partai Gerindra adalah sebesar 6,5%, dan Pemerintah harus mampu mengendalikan dampak tidak langsung kenaikan harga BBM terhadap transportasi umum.

Catatan Fraksi-fraksi atas *Lifting* Minyak : Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS mengusulkan *lifting* minyak minimal sebesar 865,0 ribu barel/hari. Catatan Fraksi-fraksi atas *lifting* Gas : Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS mengusulkan *lifting* gas minimal sebesar 1.360,0 ribu barel setara minyak/hari.

Pendapatan Negara : Berdasarkan besaran asumsi dasar yang telah disepakati, maka Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P TA 2013 adalah sebesar **Rp1.502,0 triliun**, yang terdiri dari Pendapatan Dalam Negeri sebesar Rp1.497,5 triliun dan Hibah sebesar Rp 4,5 triliun.

Belanja Negara : Belanja Negara dalam APBN-P TA 2013 disepakati sebesar **Rp1.726,2 triliun**, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.196,8 triliun (yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp622,0 triliun dan Belanja Non K/L sebesar Rp574,8 triliun) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp529,4 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat: Adapun pokok-pokok perubahan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebesar Rp12,5 triliun, yang terdiri dari (i) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

sebesar Rp7,5 triliun, (ii) Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,7 triliun, (iii) Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebesar Rp4,3 triliun dengan penambahan penyaluran menjadi 15 kali dan percepatan penyalurannya. (2) Pelaksanaan Program Khusus, yang terdiri dari (i) Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp9,3 triliun dengan parameter 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS), sebesar Rp150.000/bulan/RTS, selama 4 (empat) bulan, dan (ii) Pengalokasian anggaran untuk program infrastruktur dasar sebesar Rp7,3 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.196,8 triliun antara lain terdiri dari: (1) Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp112,5 triliun, (2) Subsidi Energi sebesar Rp299,8 triliun, yang terdiri dari: **Subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp199,85 triliun**, subsidi listrik sebesar Rp99,98 triliun, subsidi non energi sebesar Rp48,3 triliun.

Beberapa fraksi-fraksi memberikan catatan tentang subsidi BBM antara lain: (1) Fraksi PDI Perjuangan meminta untuk besaran alpha BBM bersubsidi dengan formula APBN + Rp50,0/liter subject to pembahasan besaran/alokasi anggaran subsidi BBM, dan besaran subsidi BBM, BBN dan Tabung Gas 3 Kg sebesar Rp242.000,0 miliar, (2) Fraksi PKS menyetujui volume BBM bersubsidi sebesar 47 juta KL, dengan catatan: (i) Agar dirumuskan dalam draft RUU (tambahan pasal) tentang pengendalian kuota BBM bersubsidi oleh Pemerintah, (ii) Agar Pemerintah terus berupaya untuk melakukan konversi BBM ke BBG atau energi yang lebih murah, (iii) Volume BBM bersubsidi sebesar 47 juta KL tidak dapat dilampaui untuk mendorong pengendalian, (iv) Besaran subsidi BBM, BBN dan Tabung 3 Kg dalam postur RAPBN-P TA 2013 Fraksi PKS sebesar Rp247.818,4 miliar, (v) Fraksi PAN meminta agar sistem pengawasan dan pengendalian volume BBM bersubsidi oleh Pemerintah harus berjalan dalam tahun 2013 ini, (3) Fraksi PKB meminta agar Pemerintah melakukan pengendalian volume BBM bersubsidi secara terus-menerus, (4) Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah untuk : (i) Memberikan jaminan kepada masyarakat terkait penyediaan BBM dan tidak terjadi over kuota (ii) Penghematan subsidi BBM agar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Beberapa fraksi memberikan catatan tentang subsidi listrik antara lain : *Fraksi PKS tidak menyetujui dan mengusulkan margin usaha lebih kecil dari 7%*, terhadap subsidi listrik Badan Anggaran meminta Pemerintah untuk mengutamakan *energy mix* menjadi prioritas dari pembangkit listrik untuk mengurangi penggunaan BBM.

Belanja Transfer Ke Daerah : Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah telah menyepakati transfer ke daerah sebesar Rp529,4 triliun.

Defisit : Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.502,0 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp1.726,2 triliun maka disepakati besaran defisit dalam APBN-P TA 2013 adalah sebesar **Rp224,2 triliun atau 2,38% dari PDB**. Besaran defisit ini lebih rendah dari RAPBN-P nya yang sebesar 2,48% dari PDB, namun lebih tinggi dari APBN TA 2013 yang sebesar 1,65% dari PDB.

Pembiayaan : Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut bersumber dari: (1) Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp241,1 triliun dan (2) Pembiayaan Luar Negeri (netto) sebesar negatif Rp16,9 triliun.

Hasil keputusan RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 (RUU APBN-P TA 2013) antara Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah dan Bank Indonesia telah diambil dalam rapat Paripurna, Senin, tanggal 17 Juni 2013 melalui mekanisme voting dengan jumlah suara 338 setuju dan 181 tidak setuju.

Pelantikan PAW

Ketua DPR melantik 2 orang anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) di *Operation Room* Gedung DPR, Selasa (18/6), yaitu Ade Barkah dari Partai Keadilan Sejahtera mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat XI menggantikan Kemal Azis Stamboel, dan H. Husni Nurin dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II menggantikan H. Bambang Heri Purnama. Ketua DPR berharap,

kedua anggota PAW yang baru saja dilantik dapat langsung menunjukkan performa yang optimal, terutama dalam kurun waktu produktif lebih kurang 1 tahun untuk menjabat sebagai anggota dewan.

Diplomasi Parlemen

Pada hari Selasa (18/6), Ketua DPR menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Papua New-Guinea (PNG) Peter O'Neill. Kunjungannya PM O'Neill ke Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara tetangga, meski kedua negara sudah lama menjalin hubungan baik, namun dalam berbagai bidang, khususnya hubungan ekonomi, kedua negara masih rendah. Karena itu, PM O'Neill membawa rombongan yang cukup besar ke Indonesia, dengan mengajak serta para pelaku bisnis dalam rangka memfasilitasi peningkatan hubungan kedua negara. Saat ini PNG memiliki kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa, seperti emas, nikel termasuk gas dan minyak bumi.

PM O'Neill dalam pertemuan ini mengundang Pertamina dan beberapa pe-

rusahaan migas lain untuk berinvestasi di PNG. Seperti diketahui hubungan perdagangan Indonesia-PNG masih sangat rendah sekitar 260 juta USD, terdiri ekspor sekitar 200 juta USD dan impor sekitar 60 juta US dolar sehingga peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi memiliki ruang yang besar, apalagi PNG jumlah penduduknya hanya 7 juta orang. Sementara sumber daya alam yang besar menjadi peluang Indonesia untuk berinvestasi di PNG.

Selain itu, juga disinggung masalah perbatasan antara PNG dan Indonesia yang sudah lama diselesaikan antar kedua negara. Bahkan kedua negara sudah membuka lintas perbatasan antara kota terdekat dua negara, sehingga masyarakat perbatasan kedua negara telah menjalin hubungan langsung dengan berdampingan secara damai. Pada pertemuan ini pula, PM Peter O'Neill mengundang Ketua DPR untuk bisa berkunjung ke Papua New Guinea. Sebab kunjungan parlemen juga penting dalam meningkatkan hubungan kedua negara.**

Akhirnya DPR Setujui RUU APBN-P 2013 Melalui Voting

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie didampingi empat Wakil Ketua akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk disahkan menjadi UU, Senin (17/6) malam. Penyetujuan ini diwarnai suasana panas dengan hujan interupsi dan beberapa kali loby sementara aksi mahasiswa berlangsung di balkon ruang Paripurna dan di depan Gedung DPR.



Suasana Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan atas RAPBN-P 2013.

Untuk mencapai keputusan akhir, Rapat paripurna berlangsung selama 12 jam, sebelum akhirnya diputuskan melalui voting (pemungutan suara) dimana lima fraksi menerima keputusan pengesahan, dan empat fraksi menolak. Sebanyak 338 anggota menerima pengesahan RUU menjadi UU, sedangkan sebanyak 181 anggota menolak pengesahan itu.

Rincian anggota yang menerima pengesahan adalah 143 anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD), 98 anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Amanat Nasional sebanyak 40 anggota, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sebanyak 34 anggota, dan 23 anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).

Sedangkan anggota yang menolak terdiri 91 anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), 51 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS), Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra) sebanyak 25 anggota, dan 14 anggota Fraksi Partai Hanura (F-Hanura). Marzuki Alie pun mengetuk palu tanda disahkannya RUU APBN-P 2013.

“Maka rapat paripurna ini menyetujui RUU Perubahan Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN Perubahan 2013 untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Marzuki sembari mengetuk palu pengesahan.

Rapat paripurna berlangsung alot karena terdapat beberapa poin krusial yang menjadi bahan pembahasan, diantaranya rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pro-

gram kompensasinya, yaitu Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM). Diberikan dua opsi pilihan, yaitu menerima atau menolak pengesahan, dan disepakati dilakukan melalui voting.

RAPBN-P Tandingan

Dalam rapat paripurna tersebut Fraksi PDIP Tawarkan APBN-P Tandingan dengan skenario tanpa adanya kenaikan BBM bersubsidi.

“Kalau hanya kebijakan fiskal PDIP bisa membuat APBN-P tanpa kenaikan BBM,” ujar Anggota DPR Bambang Wuryanto.

Menurut Bambang, RUU APBN-P 2013 yang diajukan mengandung substansi kenaikan BBM, dan ditambah dengan program BLSM untuk mengurangi dampak kenaikan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan *charity* kepada rakyat. “PDIP konsisten bahwa kenaikan BBM itu berpengaruh kepada kenaikan inflasi,” tegasnya.

Dia menambahkan, kebijakan kenaikan BBM yang masih belum jelas membuat semakin meningkatnya inflasi. “Bahkan inflasi bahan makanan menjelang hari raya dan kenaikan BBM menurut catatan bisa mencapai 8,5 persen,” ujarnya.



Demo mahasiswa tolak kenaikan BBM di depan gedung DPR.

PDIP, lanjutnya konsisten menolak UU APBNP khususnya RUU yang mengandung porsi kenaikan BBM. “Kita telah siapkan postur BBM tanpa menaikkan BBM,” katanya.

Sementara anggota DPR Fahri Hamzah (F-PKS) mengatakan, kenaikan BBM akan menyebabkan UKM gulung tikar, sementara inflasi umum akan merongrong neraca rumah tangga Indonesia. “Kami mengusulkan perubahan pasal 8 ayat 10 karena kami mengetahui penyesuaian harga BBM bersubsidi harus mendapatkan persetujuan Dewan,” ujarnya.

Menurut Fahri, itikad PKS mengajukan alternatif ditolak maka Fraksi PKS secara tegas, menolak RAPBNP 2013 karena kami menganggap RAPBN ini tidak sanggup dan tidak akan memberikan kekuasaan Presiden untuk menaikkan harga BBM. (si, sf)/foto: hr, wy/parle.

Pemerintah Diminta Antisipasi Efek Kejut Inflasi Kenaikan BBM

Partai Golkar mendesak Pemerintah segera dapat mengantisipasi efek kejut inflasi dari kenaikan BBM bersubsidi. “Karena itu perlu program untuk mengurangi efek kejut tersebut selama kurun waktu 3-4 bulan,” ujar Anggota DPR Satya W. Yudha saat Pengambilan keputusan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin malam (17/6).

Menurut Satya, jangka menengah pemerintah harus memfokuskan pembangunan infrastruktur desa karena pembangunan berasal dari pedesaan. “Kami juga tidak menutup mata untuk jangka panjang kita masih minim pengembangan energi yang terintegrasi dan pengalihan bauran energi,” jelasnya.

Dia menambahkan, program bauran tersebut bertujuan untuk mengalihkan bahan bakar mahal menuju bahan ba-



Anggota DPR Satya W. Yudha.

kar yang murah. “Program gabungan ini diharapkan dapat menjamin kesinambungan kita kedepan, karena itu Golkar menyetujui UU APBNP 2013 ini,” ujarnya.

Anggota DPR Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) mengatakan, kenaikan BBM akan menciptakan orang miskin baru sebesar 4 juta orang. “Akibat kenaikan inflasi pemerintah menanganinya dengan cara pemberian yang tidak mengatasi kemiskinan,” tegasnya.



Anggota DPR Ahmad Muzani.

Gerindra menginginkan pemerintah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dasar pedesaan, dan pemenuhan angkutan secara gratis bagi masyarakat desa, kota bahkan kaum buruh. “Hal itu tidak tercermin dalam postur UU APBN-P 2013, dan tidak mencerminkan pada upaya untuk kaum lemah, dengan pemberian kredit UKM, pupuk dan benih secara baik kepada kaum tani. memanfaatkan lahan produk lebih baik lagi di masa mendatang,” terangnya. (si)/foto:iwan armanias,wahyu/parle.

Fraksi Gerindra Tolak Dua Pasal di UU APBN-P 2013



Anggota DPR Fary Djemy Francis.

Anggota DPR Fary Djemy Francis (Fraksi Gerindra) menegaskan, Fraksinya menolak dua Pasal yang ada di dalam Perubahan atas UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013. “Berkaitan dengan UU APBNP 2012 kami pada posisi menolak pada pasal terkait inflasi dan penghematan subsidi

BBM, kami menyatakan penolakan dengan tegas terhadap dua hal tersebut,” ujarnya saat pembahasan Tingkat II/Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2013, yang dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (17/6).

Menurut Fary, Gerindra mencatat bahwa Fraksinya menolak inflasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 7.2 persen. Pasalnya, dirinya berkeyakinan dengan kerja keras pemerintah maka inflasi seharusnya berada dikisaran 6.5 persen.

“Kami fokus dengan inflasi tidak sama dengan pemerintah karena dengan potensi 7.2 persen maka kita tidak ingin membiarkan ada kenaikan jumlah orang miskin sebesar empat juta orang akibat inflasi sebesar tersebut,” ujarnya.

Dia mengatakan, Gerindra menilai perlu adanya konsep strategi dengan mendorong infrastruktur dasar guna menciptakan lahan produktif yang bisa dikerjakan secara padat karya, gotong royong dan memberdayakan masyarakat.

Sementara terkait penghematan subsidi, Fary menilai, penghematan subsidi langsung harus terarah dengan membebaskan transportasi umum, serta kegiatan yang berkaitan dengan hidup orang banyak. “Kita tidak ingin adanya pemberian secara langsung berkaitan dengan kenaikan BBM,” terangnya. (si)/foto:iwan armanias/parle

Penyaluran BLSM dan PKH Harus Dikelola Transparan

Achmad Dimiyati Natakusumah (Fraksi PPP) mengharapkan Penyaluran kompensasi kenaikan BBM seperti BLSM, PKH dan Raskin dapat dikelola secara transparan dan jelas untuk kepentingan rakyat.

“Kita mengharapkan transaksi keuangan juga harus jelas dan sampai sasaran,” jelasnya saat Pengambilan keputusan tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013 dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung Nusantara II, Senin, (17/6).

Menurutnya pemberian angsuran BLSM untuk rakyat miskin sebanyak dua kali seharusnya dipecah menjadi empat kali dengan pembayaran setiap bulan. “Ini jangan sampai dipolitisasi oleh pemerintah dan Parpol tertentu,” katanya.

Pada kesempatan itu, Dimiyati meminta pemberian Raskin diberikan secara tunai bukan diberikan berasnya. “Lebih baik masyarakat beli langsung ke Pasar karena harganya sama,” ujarnya.

Dia mengatakan, selama ini penyaluran Raskin kerap diselewengkan oleh oknum kepala desa, penegak hukum diberbagai daerah. “Kedepan harusnya ini dikelola langsung



Anggota F-PPP Dimiyati Natakusumah.

oleh Menteri Keuangan dan transaksinya kepada penerima langsung,” harapnya. (si)foto:odjie/parle

Hanura Tolak RUU APBN-P TA 2013



Anggota DPR Erik Satrya Wardhana.

Fraksi Hanura menolak RUU APBNP TA 2013 yang berisi kenaikan harga BBM bersubsidi “Terjadinya defisit keuangan negara karena kelemahan pemerintah bukan subsidi BBM yang meningkat kenaikan harga BBM seperti yang diusulkan,” ujar Erik Satrya Wardhana (Fraksi Hanura) saat Pengambilan keputusan tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013 dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin, (17/6).

Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi meningkatkan laju inflasi 7,76 persen, walaupun asumsi makro 7,2 persen. Sementara jika tidak dinaikkan inflasi akan mencapai 5,8 persen. “Kenaikan Harga BBM tentunya akan memberatkan rakyat dan menurunkan daya beli secara maksimal,” terangnya.

Dia menambahkan, guna mengurangi beban rakyat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi dengan program seperti BLSM, BLT menjadi tidak relevan karena berpotensi menjadi praktek *money politic* yang dibungkus dengan program pemerintah. “Fraksi Hanura konsisten menolak kenaikan harga BBM, menolak RUU APBNP TA 2013,” tegasnya. (si)foto:wahyu/parle.

Pro Kontra Kenaikan Harga BBM di dalam dan luar Gedung DPR



Anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf.

Disaat DPR RI berdebat dalam sidang paripurna Senin (17/6) dengan agenda tunggalnya pengambilan keputusan terhadap Perubahan UU No.19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013, di luar gedung DPR RI sejumlah massa dari berbagai organisasi masyarakat berunjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak).

“Kenaikan BBM adalah domain pemerintah, tidak lagi di DPR. Menurut kami apa yang diusulkan pemerintah tersebut adalah hal yang tepat. Mengingat selama ini subsidi BBM hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Oleh karena itu kami mendukung pengurangan subsidi BBM yang diusulkan pemerintah,” jelas Nurhayati Ali Assegaf.

Ditambahkan Nurhayati yang ditemui sesaat sebelum memasuki ruang sidang Paripurna, Senin (17/6), sebenarnya agenda rapat hari ini adalah Perubahan APBN 2013 yang sebenarnya sudah dibahas di Komisi dan di Banggar (badan anggaran) DPR RI.

“Ada pengurangan belanja anggaran dari pemerintah yang akan digunakan untuk memberi bantuan bagi rakyat miskin atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Disini pemerintah mengajak *sharing the pain* atau berbagi sakit. Klo rakyat dikurangi, berarti pemerintah harus mau dibagi juga,” tambah Nurhayati.

Berbeda dengan Nurhayati, dari dalam ruang sidang, Anggota DPR RI Erik Satrya Wardhana menolak kenaikan BBM dengan alasan bahwa terjadinya defisit keuangan negara bukan karena meningkatnya subsidi BBM tapi karena kelemahan pemerintah sendiri.

Sementara itu saat ditemui Parle dari luar gedung DPR Senayan, ditengah-tengah demonstrasi sekitar dua ribuan buruh Presiden Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Said Iqbal mengatakan bahwa rencana pemerintah menaikkan BBM sangat melukai hati buruh Indonesia dan juga rakyat.

“Dengan kenaikan BBM maka daya beli buruh turun 30 persen. Sementara upah buruh yang sempat naik 30 per-

sen itu menjadi percuma, belum lagi tidak berjalannya jaminan kesehatan, transportasi publik yang belum ada. Menaikan BBM ini tidak menjawab persoalan di masyarakat. Orang mis-



Demonstrasi kenaikan BBM di luar gedung DPR RI.

kin dibantu dengan BLSM, kemudian diturunkan lagi dan akhirnya tambah miskin dengan kenaikan BBM,” ujar Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal menilai bahwa pengalihan dana subsidi BBM ke BLSM itu hanya sebuah pencitraan pemerintah menjelang Pemilu 2014. Jika penolakan rencana kenaikan BBM ini tidak diindahkan juga, maka Iqbal mengancam akan melakukan mogok nasional pada 16 Agustus 2013 untuk pekerja seluruh Indonesia. (Ayu) foto:ry/parle.

Banggar Sepakati APBN-P 2013 Rp. 1726.2 Triliun

Banggar DPR menyepakati Belanja Negara dalam APBN-P TA 2013 sebesar Rp. 1726.2 Triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1196 Triliun dan transfer daerah sebesar Rp. 529 Triliun.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit saat melaporkan Pandangan Banggar Terhadap RUU APBN-P TA 2013 di Rapat Paripurna, Senin, (17/6).

Menurut Ahmadi, terdapat beberapa program kebijakan belanja Pemerintah Pusat meliputi antara lain program P4S sebesar Rp. 12.5 Triliun. “Program BSM sebesar Rp. 7.5 Triliun, program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp. 0.7 Triliun, Raskin sebesar Rp. 4.3 Triliun dengan penambahan penyaluran menjadi 15 kali dan percepatan penyalurannya,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, pelaksanaan Program khusus



yang terdiri dari Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp/ 9,3 Triliun dengan parameter 15,5 juta Rumah tangga sasaran, sebesar Rp. 150 Ribu/bulan/RTS selama empat bulan, kemudian pengalokasian anggaran untuk program infrastruktur dasar sebesar Rp. 7.250 Triliun.

Dia menambahkan, belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1196,8 Triliun antara lain terdiri dari pembayaran bunga hutang sebesar Rp. 112,5 Triliun, subsidi energi sebesar Rp. 299,8 Triliun yang terdiri dari, subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp. 199,85 Triliun. (as)/foto:wahyu/parole.



Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit.

Laporan Banggar Tetapkan Inflasi 7,2 Persen

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie dengan agenda tunggal pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU APBN-P 2013 hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) menetapkan angka inflasi 7,2%.

Angka tersebut memang sempat diberi catatan pula oleh fraksi-fraksi yang selama ini menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dalam laporan Banggar yang disampaikan Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit dijelaskan, inflasi disepakati sebesar 7,2%.

Catatan yang dikemukakan dalam laporan tersebut datang dari F-PDI Perjuangan yang menyetujui inflasi sebesar 6,0%. Senada dengan F-PDI Perjuangan, F-PKS juga mengajukan angka yang sama (6,0%), namun tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara menurut F-Gerindra, angka inflasi adalah 6,5% dan pemerintah diminta mampu mengendalikan dampak kenaikan BBM terhadap transportasi umum.



Anggota F-PKS Ecky Awal Mucharam.

Dalam laporan Banggar tersebut juga dikemukakan, besaran angka-angka yang disepakati. Nilai tukar rupiah misalnya, disepakati Rp 9.600/US\$. Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan disepakati pada angka 5,0%. Untuk harga rata-rata minyak mentah Indonesia sebesar US\$108,0/barel.



Anggota F-PDI Perjuangan Aria Bima.

Untuk *lifting* minyak, laporan Banggar dalam Rapat Paripurna tersebut disepakati 840,0 ribu per hari dengan catatan F-PDI Perjuangan dan F-PKS mengusulkan *lifting* minyak minimal sebesar 865,0 ribu barel per hari. *Lifting* gas 1.240,0 ribu barel setara minyak per hari. Namun F-PDI Perjuangan dan F-PKS lagi-lagi memberi catatan dengan mengusulkan *lifting* gas minimal 1.360,0 ribu barel setara minyak per hari.

Sedangkan *lifting* minyak dan gas disepakati sebesar 2.080,0 ribu barel per hari dalam APBN-P dari sebelumnya 2.260,0 ribu barel per hari dalam APBN 2013. Asum-asumsi dasar ini sudah dibahas dalam pembicaraan tingkat I di rapat Banggar dengan pemerintah yang menghadirkan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI. (mh)/foto:iwan armanias, odjie/parole.

Panja Hambalang Akan Terus Bekerja



Ketua Panja Hambalang, Agus Hermanto.

Panja Hambalang DPR RI akan segera memanggil Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) khususnya Dirjen Cipta Karya untuk meminta rekomendasi terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bogor,

Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panja Hambalang, Agus Hermanto sesaat sebelum berlangsungnya Rapat Paripurna, Senin (17/6).

“Kami akan meminta rekomendasi Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum apakah keadaan bangunan Hambalang masih layak dan masih bisa dilanjutkan, karena seperti diketahui selama ini proses pembangunan Hambalang sudah berlangsung.

Bahkan konon katanya sudah dilakukan rekayasa teknologi, melakukan *boldfield*, tata salur air. Dari rekomendasi tersebut kemudian kita akan bisa mengambil kesimpulan langkah apa yang harus diambil Panja Hambalang selanjutnya,” jelas Agus.

Ditambahkan Ketua Komisi X DPR RI ini ia berharap bahwa proyek tersebut bisa dilanjutkan atau paling tidak gedung yang saat ini sudah terbangun bisa dimanfaatkan. Mengingat proyek tersebut sudah menyedot banyak anggaran Negara.

Meski demikian, mengingat dalam proyek tersebut sempat terjadi tindak pidana korupsi, dimana kemudian bangunan P3SON itu menjadi alat bukti kejahatan, maka Agus berharap agar kasus tersebut dapat segera terungkap dan diselesaikan dengan baik.

“Kami tidak ingin mencampuri masalah hukum yang sedang berlangsung dari kasus tersebut. Kami akan terus mendorong KPK dan BPK yang sudah bekerja dengan keras mengaudit dan menyelidiki atau mengungkap kasus ini. Untuk itu saya berharap agar kasus ini dapat segera terselesaikan,” tambahnya. (Ayu)/foto:odjie/parle/iw.

Komisi I Minta Masukan Jelang *Fit & Proper Test* Anggota KIP

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa Calon Anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif, diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Presiden telah mengajukan sejumlah 31 (dua puluh satu) orang calon dan selanjutnya dipilih oleh DPR RI menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Dari 31 (dua puluh satu) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat di samping ini akan melalui uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 7 (tujuh) Anggota Komisi Informasi Pusat yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat untuk Periode 2013-2017, yaitu:

NO.	NAMA	KOMPETENSI	UNSUR
1.	Juniardi, S.IP., M.H.	Hukum	Masyarakat
2.	Hendrayana, S.H.	Hukum	Masyarakat
3.	Muhammad Yasin, S.H., M.H.	Hukum	Masyarakat
4.	Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H.	Hukum	Masyarakat
5.	Yhannu Setyawan, S.H., M.H.	Hukum	Masyarakat
6.	Deti Kurniawati, S.E., M.H.	Hukum	Masyarakat
7.	John Fresly, S.H., LL.M	Hukum	Pemerintah
8.	Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H.	Komunikasi	Masyarakat
9.	Dr. Hj. Retno Intani ZA, M.Sc.	Komunikasi	Masyarakat
10.	Dr. Halomoan Harahap, M.Si.	Komunikasi	Masyarakat
11.	Devitri Indriasari, M.Si.	Komunikasi	Masyarakat
12.	Dra. Henny S. Widyaningsih, M.Si.	Komunikasi	Masyarakat
13.	Dra. Tiurma Mercy Sion Sihombing	Komunikasi	Masyarakat
14.	Dr. Ir. H. Wawan Wardiana, M.T.	Komunikasi	Masyarakat
15.	Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si.	Manajemen dan Tata Kelola	Pemerintah
16.	Wahyu Kuncoro, S.IP., M.Si, M.IP.	Manajemen dan Tata Kelola	Masyarakat
17.	Dr. Rumadi, M.A.	Manajemen dan Tata Kelola	Pemerintah
18.	Ahmad Alamsyah Saragih, S.E.	Manajemen dan Tata Kelola	Masyarakat
19.	Drs. Tarman Azzam, M.Sc.	Manajemen dan Tata Kelola	Pemerintah
20.	Drs. Soemarno Partodihardjo, M.Si.	Manajemen dan Tata Kelola	Pemerintah
21.	Ir. Abdulhamid Dipopramono, M.Si.	Manajemen dan Tata Kelola	Masyarakat

Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 13 Juni 2013 menugaskan Komisi I DPR RI untuk menangani pembahasan dan pemilihan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 lewat uji kepatutan dan kelayakan. Adapun uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2013.

Dengan adanya pengumuman ini, DPR RI meminta masukan dari masyarakat mengenai 21 (*dua puluh satu*) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat tersebut di atas untuk mendapatkan Anggota Komisi Informasi Pusat yang sesuai dengan harapan kita semua.

Masukan dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Gedung MPR/DPR, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 atau melalui alamat email: set_komisi1@dpr.go.id. (mp)/
foto,tabel:iwan armanias,ry/parle.



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Delapan Fraksi Setujui RUU Ormas



Anggota F-PAN Achmad Rubaei.

Meskipun telah memasuki enam kali masa persidangan, seperti RUU Ormas masih belum dapat disahkan. Pasalnya, berbeda dengan kedelapan fraksi lainnya di DPR, Fraksi PAN belum menyetujui RUU Ormas.

Diwakili oleh juru bicara F-PAN, Achmad Rubaei menyatakan bahwa fraksinya belum dapat menyetujui RUU Ormas. Hal tersebut disampaikan oleh Achmad Rubaei, Rabu (19/6) dalam rapat Pansus RUU Ormas dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Gedung DPR RI, Senayan.

“Kami belum dapat menyetujui draft RUU tersebut, karena setelah kami menghimpun pendapat dari beberapa ormas dan LSM, masih ada yang keberatan dengan adanya RUU tersebut. Salah satu yang menjadi keberatan mereka adalah keinginan dibedakannya antara LSM dengan Ormas, dengan kata lain LSM bukanlah sebuah ormas. Karena memang dari segi histori dan filosofinya antara LSM dan Ormas memang tidak sama, sementara dalam RUU ini seolah-olah meny-

makan antara LSM dan Ormas,” jelas Achmad Rubaei.

Untuk itulah, kata Rubaei, fraksinya meminta waktu untuk kembali mendiskusikan dengan LSM atau Ormas yang menyalurkan aspirasinya kepada fraksinya. Ia berharap agar RUU yang ingin mengatur ormas ini jangan sampai ditolak oleh ormas itu sendiri.

“Ini kan cerminan masyarakat. Kami sedang ber-



Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain.

dialog dengan elemen masyarakat, sehingga kami menunda persetujuan RUU ini semata-mata untuk memperkuat basis sosiologi dari RUU ini sendiri,” ungkap Rubaei.

Sementara itu Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain mengatakan diyakini F-PAN akan menyetujui RUU ini. Pasalnya dari tujuh buah rekomendasi atau usulan dari fraksi tersebut sudah diakomodir dalam RUU Ormas ini. Dengan kata lain keberadaan RUU ini bukan sebuah pengekan terhadap kebebasan ber-

pendapat dan berserikat, melainkan mengatur ormas agar lebih tertib dalam menyalurkan berserikat.

“Secara substansi F-PAN tidak ada masalah dengan RUU Ormas ini, hanya mungkin masih membutuhkan waktu bagi F-PAN untuk meyakinkan Ormasnya. Kita tunggu sampai seminggu lagi, tanggal 25 Juni Insya Allah RUU Ormas ini bulat dan tidak lonjong, sehingga sudah bisa dibawa ke Paripurna. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan lagi ke depannya,” ujar Haramain. (Ayu) Foto: wy/parle.

Peluang Tingkatkan Hubungan Ekonomi dan Perdagangan dengan PNG Cukup Besar



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Perdana Menteri Papua New Guinea Peter O' Neill.

Ketua DPR Marzuki Alie di ruang kerjanya Lantai III, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6) siang menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG) Peter O'Neill. Menurut Ketua DPR, PM O'Neill baru terpilih tahun 2012 lalu sebagai Perdana Menteri PNG yang baru dari Partai Nasional. Kunjungannya ke Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara tetangga, meski kedua negara sudah lama menjalin hubungan baik, namun dalam berbagai bidang khususnya hubungan ekonomi kedua negara masih rendah.

Karena itu, kata Ketua DPR, PM O'Neill membawa rombongan yang

cukup besar ke Indonesia dengan mengajak serta para *businessman* dalam rangka memfasilitasi peningkatan hubungan kedua negara. Dalam pertemuan ini juga dibahas kemungkinan meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara, apalagi PNG memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa seperti emas, nikel termasuk gas dan minyak bumi.

PM O'Neill dalam pertemuan ini juga mengundang Pertamina dan beberapa perusahaan migas lain untuk berinvestasi di PNG. Seperti diketahui hubungan perdagangan Indonesia-PNG masih sangat rendah sekitar 260 juta USD, terdiri ekspor sekitar 200

juta USD dan impor sekitar 60 juta US dolar sehingga peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi memiliki ruang yang besar, apalagi PNG jumlah penduduknya hanya 7 juta orang. Sementara sumber daya alam yang besar menjadi peluang Indonesia untuk berinvestasi di PNG.

Saat ditanya tentang kehadiran Menteri PU Djoko Kirmanto yang menyertai kehadiran rombongan PM Peter O'Neil, menurut Ketua DPR, kapasitas Menteri PU mendampingi selama kunjungan PM PNG di Indonesia. Sebelumnya saat PM Australia berkunjung ke Indonesia, tamu negara ini didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas.

Pada pertemuan ini pula, PM Peter O'Neil mengundang Ketua DPR untuk bisa berkunjung ke Papua New Guinea. Sebab kunjungan parlemen juga penting dalam meningkatkan hubungan kedua negara.

Menjawab pertanyaan mengenai perbatasan kedua negara, Marzuki Alie mengatakan soal perbatasan tidak ada masalah, sudah lama diselesaikan antar kedua negara. Bahkan kedua negara sudah membuka lintas perbatasan antara kota terdekat dua negara, sehingga masyarakat perbatasan kedua negara telah menjalin hubungan langsung dengan berdampingan secara damai. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Panja Apresiasi Tim 11 BPN Lakukan Langkah Konkrit

Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Tim 11 (sebelas) Badan Pertanahan Nasional (BPN RI) yang telah melakukan langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian kasus pertanahan yang ada, dan meminta kepada tim 11 untuk mengklasifikasikan kasus-kasus yang telah diselesaikan dan target waktu penyelesaian serta data terkait dengan permasalahan pertanahan tersebut.

Demikian isi salah satu kesimpulan, saat RDP Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja de-

ada.

Dalam RDP kali ini, disepakati untuk dilakukan kunjungan lapangan bersama Komisi II DPR dengan BPN RI ke beberapa daerah untuk meninjau secara langsung fakta dan bukti otentik terkait konflik dan sengketa pertanahan di daerah tersebut.

Pada kesimpulan terakhir, Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR akan mengagendakan rapat gabungan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kesepakatan dalam rangka mencari solusi atas kasus pertanahan tersebut.



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja.

kasus menunggu pelepasan aset dari Menkeu selaku pengelola barang dan Menteri yang bersangkutan selaku pengguna barang,” jelas Effendi.

Ia menambahkan, 1 kasus saat ini sedang ditangani Tim yang dibentuk oleh Menkopolkum sesuai inpres No.2 Tahun 2013 dan sebanyak 13 kasus masih dalam proses penanganan di BPN RI.

Dalam kesempatan ini, menurut Effendi, karena dalam upaya penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang berkaitan dengan Kemenkeu yang berkoordinasi dengan Kemenhan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, maka BPN berharap mendapat dukungan sepenuhnya dari Panja untuk memfasilitasi rapat gabungan dalam rangka memperoleh kesepakatan, sekaligus mencari solusi atas kasus pertanahan yang dihadapi agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.

Selanjutnya, dalam laporannya, Effendi juga menerangkan, bahwa Tim 11 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No.336/KEP-25.2/IX/2012 tanggal 10 September 2012, telah diubah dengan Keputusan BPN RI No.227/KEP-25.2/IV/2013 tanggal 14 April 2013 dengan jumlah Tim 14 sebagian merupakan lanjutan dari kasus yang ditangani Tim 11.

“Pembentukan Tim 14 didasari adanya penambahan kasus yang ditangani dalam rangka percepatan penyelesaiannya,” ujar Effendi. (nt) Foto wy/parle.



Deputi Bid. Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI Effendi.

ngan Tim 11 (sebelas) BPN RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/6).

Selanjutnya, Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR akan mengundang pihak-pihak yang terkait baik dari Pemerintah, BUMN, maupun pihak swasta dalam rangka mencari solusi atas kasus pertanahan yang ada.

Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR dalam kesimpulan lainnya, akan mengagendakan rapat atau konsiyering dengan BPN RI dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kesepakatan dalam rangka mencari solusi atas kasus pertanahan yang

Sementara itu, Deputi Bid. Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI Effendi di kesempatan ini menjelaskan perkembangan penanganan kasus pertanahan yang telah diselesaikan dan sedang ditangani oleh Tim Penanganan Dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Yang Berpotensi Konflik Strategis (Tim 11).

Adapun kasus yang ditangani menurut Effendi, adalah sebanyak 38 kasus terbagi dalam 3 kategori yaitu jangka pendek, menengah dan panjang, “Sampai dengan bulan Juni 2013 Tim sudah dapat menyelesaikan sebanyak 10 kasus, sedangkan 6 kasus penyelesaiannya menunggu adanya pelepasan aset dari Menteri BUMN, 8

Cegah Konflik, Kapolri Didesak Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswi SMK di Kalbar



Anggota Komisi III Nudirman Munir.

Komisi III DPR RI mendesak Kapolri memberikan perhatian terhadap mandegnya penyelidikan kasus perkosaan dan pembunuhan Harnofiah Fitryani, siswi SMKN 1 Mempawah, Kalbar. Kepolisian seharusnya memberikan prioritas pada kasus ini karena diduga dapat menimbulkan konflik horizontal.

Jakarta, Selasa (18/6/13).

Ia mempertanyakan kenapa polisi tidak memeriksa karyawan dan pemilik pabrik tempat korban terakhir kali terlihat. Data lain yang diperoleh Tim Komisi III, sejumlah saksi yang dipanggil polisi menerima ancaman agar

“Kita telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melakukan kunjungan spesifik ke Pontianak. Kasus ini bisa meluas jadi konflik horizontal berbau SARA karena melibatkan dua suku berbeda. Sudah 6 bulan kasusnya macet, karena penyelidikan penyidikan tidak optimal,” kata anggota Komisi III Nudirman Munir dalam rapat kerja dengan Kapolri di Gedung DPR, Senayan,

tidak memberi keterangan. Menurut mantan pengacara ini seharusnya polisi menyita hp atau melacak pihak yang mengancam.

Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf pada kesempatan itu menyerahkan berkas berisikan temuan yang berhasil dihimpun dalam kunjungan spesifik ke Pontianak, Kalbar. “Kita menemukan ada beberapa kejanggalan. Kita harap Kapolri mendorong aparatnya menuntaskan kasus yang mendapat perhatian masyarakat di Kalbar,” imbuhnya.

Kepada wartawan usai rapat Kapolri Jendral Timur Pradopo berjanji segera menindaklanjuti kasus ini. “Kita akan segera mengirim tim ke Kalbar,” pungkasnya dia.

Harnofiah Fitryani, 15, menghilang pada Selasa, 18 Desember 2012 lalu. Jasadnya ditemukan di rawa tak jauh dari rumahnya tiga hari kemudian. Di kepalanya terdapat tanda memar dan diduga diperkosa. Sejumlah komponen masyarakat sudah melakukan unjuk rasa meminta Polda Kalbar menuntaskan kasus ini. (iky) foto:ry/parle

DPR Dorong Terwujudnya Sistem Pertahanan Negara yang Tangguh

DPR mendorong terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul. Apalagi di era otonomi daerah sekarang ini, tantangan dan ancaman dapat muncul dalam berbagai bentuk dan daerah, terutama wilayah perbatasan, merupakan wilayah yang rawan untuk diganggu.

Demikian ditegaskan Ketua DPR Marzuki Alie ketika menyampaikan sambutan yang dibacakan Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada acara diskusi “Membangun Strategi

Pertahanan Nasional Melalui Potensi Daerah” di *Operation Room* Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6). Diskusi digelar oleh Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) menampilkan pembicara Wamenham Letjen (Purn) Syafrie Syamsudin, mantan KASAD Jenderal TNI Purn. Tyasno Sudarto dan Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno.

Lebih lanjut Ketua DPR mengatakan, dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan

kebijakan dan strategi pertahanan berupa *Strategic Defence Review (SDR)*-Strategi Pertahanan Raya dan postur pertahanan yang layak sebagai dasar pembangunan kekuatan.

Selama ini, ungkap Ketua DPR, kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial.

Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencu-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti.

kupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif.

Ketua Umum DPP IARMI MS.Kaban dalam sambutannya mengatakan, hingga kini para anggota IARMI tetap mempunyai semangat nasionalisme dan menjunjung tinggi keutuhan NKRI serta tidak terkontaminasi dengan ideologi apapun. IARMI juga mendukung segera dilahirkannya Undang-undang Komponen Cadangan (Komcad) yang selama ini sudah menjadi isu publik dan dalam waktu dekat akan dibahas DPR bersama pemerintah. (mp) Foto: ry/parle.

DPR RI Desak Kemendikbud Optimalkan Kinerja

Komisi X DPR RI menilai kinerja Kemendikbud masih belum optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, Komisi X mendesak jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan DIPA Satker yang belum selesai agar program/kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan optimal, tepat sasaran dan tepat waktu.

“Komisi X melihat kinerja Kemendikbud masih belum optimal. Realisasi penyerapan anggaran Kemendikbud tahun 2013 sebesar 20,3% dari pagu APBN 2013 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga perlu diambil langkah-langkah strategis,” ujar Wakil Ketua Utut Adianto ketika memimpin raker antara Komisi X dengan Mendikbud M. Nuh di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa sore (18/6).

Terkait dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, tambah Utut, Komisi X meminta pengawasan terhadap penyaluran bantuan itu. Pengawasan perlu diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

“Anggaran bantuan ini kan cukup besar. Saya mengusulkan ada anggaran untuk pengawasan pelaksanaan BSM. Anggaran bisa diambil dari dana *safe guarding* yang mencapai Rp 60 miliar itu,” timpal Anggota Komisi X Ferdiansyah.

Masih terkait dengan pengawasan BSM, Komisi X men-



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto dan Syamsul Bachri menandatangani RKA-KL Kemendikbud RAPBN-P 2013.

desak Mendikbud untuk segera menyampaikan dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BSM. Komisi X khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan ketika program ini berlangsung nantinya.

Selain membahas kinerja dan BSM, raker juga membahas pemanfaatan sisa anggaran Kurikulum 2013 sebesar Rp 323 miliar. Rencananya, sisa anggaran akan dialokasikan untuk Direktorat Pembinaan di Tingkat SD-SMA/SMK. Dan terkait dengan rehabilitasi ruang kelas, Komisi X dan Mendikbud sepakat untuk memprioritaskan bagi daerah yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, daerah terdepan, daerah terluar dan daerah tertinggal. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

Komisi IX Desak Kemenlu Berikan SPLP



Anggota Komisi IX DPR RI, Oki Asokawati.

Anggota Komisi IX DPRRI, Oki Asokawati mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar negeri untuk segera memberikan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) kepada WNI dan TKI di Luar Negeri.

Ditambahkan Oki yang ditemui Parle, Selasa (18/6) sore, hal tersebut menjadi salah satu kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pengawasan dan pelayanan kepada warga negaranya di luar negeri, terlebih lagi kepada TKI yang notabene telah memberikan andil terhadap pemasukan devisa negara.

“SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor ini merupakan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh perwakilan Indonesia (KBRI/KJRI/KRI) di luar negeri karena paspor yang hilang. Dengan adanya SPLP maka hak-hak TKI selama di negeri orang menjadi terjamin, terutama yang menyangkut keselamatan dan keamanan,” jelas Oki.

Ditambahkan politisi dari Fraksi Persatuan Pembangunan, selain SPLP pemerintah juga wajib memberikan KTKLN atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar negeri sebagai kartu identitas diri para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Selain itu, terkait dengan adanya tindakan percaloan atau pungutan liar di luar prosedural terhadap TKI yang ingin mengurus dokumentasi keimigrasiannya, Oki meminta Kemenlu untuk segera menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

Misbakhun Mundur, DPR Hanya Uji 21 Calon Anggota BPK

Mukhamad Misbakhun merupakan salah satu calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masuk daftar *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) di Komisi XI. Dalam jadwal yang dirilis Sekretariat Komisi XI, Misbakhun akan melakukan uji pada hari ini, Rabu (19/6) pukul 19.00 WIB. Namun ternyata ia melayangkan surat pengunduran dirinya dari pencalonan.

“Kami menerima surat dari Pak Misbakhun kemarin 18 Juni. Adapun bunyi alasannya: karena ingin lebih berkonsentrasi menghadapi pemilu legislatif 2014, dimana saya mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Tapi



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

saya belum tahu dari partai mana,” seloroh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis yang disambut tawa oleh para wartawan di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (19/6).

Komisi XI mengagendakan uji kepatutan dan kelayakan kepada seluruh calon anggota BPK selama dua hari, dimulai dari kemarin, Selasa (18/6). Direncanakan, keputusan Komisi XI akan diumumkan 25 Juni nanti. Namun Harry belum bisa memastikan bagaimana sistem pemilihan satu nama yang akan menggantikan Taufiqurrahman Ruki itu.

“Saya belum tahu apakah nanti kompromi masing-masing fraksi menyebut satu nama atau voting (pemungutan suara). Sedangkan tiga nama yang direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing anggota dan fraksi, bukan Komisi.

Semua diserahkan ke masing-masing anggota dan fraksinya, bisa sesuai tiga nama rekomendasi dari DPD, tapi bisa juga di luar tiga nama itu,” ujar Harry.

Harry menambahkan, sampai saat ini ia belum bisa menentukan sosok calon pengganti Ruki. Ia akan menunggu

sampai proses uji kepatutan dan kelayakan selesai. Ia berharap, calon anggota yang terpilih adalah orang yang memiliki kompeten, track record yang bagus, dan memiliki integritas yang tinggi. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

DPR akan Klarifikasi Dahlan Soal Lelang PLTU Riau dan Kaltim

Komisi VI DPR akan meminta klarifikasi dan penjelasan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait laporannya kepada KPK mengenai pelanggaran pelelangan pembangunan PLTU Riau dan Kaltim.

Hal itu mengemuka saat Komisi VI DPR RDP dengan Dirut PLN Nur Pamudji, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K. Harman, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (19/6).

“Tentu hal yang diklarifikasi dan dilaporkan Mantan Dirut PLN harus diketahui oleh Dirut sekarang ini, termasuk juga proses lelang PLTU Riau, ini aneh,” terang anggota DPR Chairuman Harahap dari Partai Golkar,



Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K. Harman

Menurutnya, Dirut PLN sekarang tidak bisa terlepas dari tanggung jawab manajemen dan mengetahui apa yang dituduhkan dan diklarifikasi oleh Dirut PLN lama Dahlan Iskan.

Dirut PLN Nur Pamudji mengatakan, PLN melihat tidak ada masalah pelelangan yang dilakukan saat era Dahlan Iskan. “Sebelumnya Pak Dahlan melihat adanya tuduhan penyelewengan pelelangan pembangunan PLTU Riau dan Kaltim, karena itu beliau tidak ingin kejadiannya simpang siur, jadi dirinya meminta KPK memeriksa proses lelang itu,” ujarnya. (si)/foto:iwan armianas/parle.

Anggaran Infrastruktur Meningkatkan 30 persen

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengatakan, Anggaran infrastruktur terus naik untuk tahun 2014 mending bahkan kenaikan mencapai 30 persen. “Infrastruktur terus naik untuk infrastruktur dasar dan lainnya bahkan mencapai 30 persen,” ujarnya tanpa merinci peruntukkan anggaran tersebut.

Menurut Laurens, anggaran ini masih dalam pembicaraan pendahuluan dan semua kebijakan berada di Banggar. “Kita masih harus menunggu perhitungan di Banggar, terkait lifting migas, pertumbuhan ekonomi dan yang lainnya,” terangnya saat Raker membahas RKP dan RKA RAPBN 2014 seluruh Kementerian lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung Nusantara, Rabu (19/6).

Terkait kekurangan 13 juta rumah, Laurens mengatakan, Kemenpera harus segera meningkatkan kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama.

Seperti kita ketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp755 triliun mulai tahun ini sampai 2014 untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Dari jumlah tersebut sebesar Rp 544 triliun berasal dari pemerintah, dan sisanya Rp211 triliun dari kerja sama pemerintah swasta (*public private partnership/PPP*).

Adapun alokasi pembangunan infrastruktur, sebesar

Rp143 triliun digunakan untuk membangun jalan, Rp138 triliun untuk membangun jalur kereta api, dan Rp49 triliun untuk pelabuhan laut.

Untuk membangun bandara dialokasikan dana sebesar Rp14 triliun, kelistrikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp288 triliun, infrastruktur keairan Rp8 triliun, telekomunikasi Rp102 triliun, serta lain-lain Rp 13 triliun. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Timwas Century Akan Panggil Tim Pemburu Aset Robert Tantular



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman.

Tim Pengawas kasus Bank Century DPR akan memanggil Tim Pemburu Aset Bank Century. Pemanggilan Tim Pemburu Aset dilakukan lantaran adanya informasi bahwa Robert Tantular, terpidana kasus Bank Century diduga menjual asetnya padahal posisinya dalam tahanan.

Demikian salah satu kesimpulan rapat internal Timwas Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman di Jakarta, Rabu (19/6). Sedianya rapat Timwas Century dilakukan dengan mengundang KPK namun tidak hadir karena alasan rapat Timwas DPR dengan KPK belum lama dilangsungkan yakni tanggal 5 Juli 2013 lalu.

Menurut Sohibul, informasi adanya aset yang dijual oleh Robert Tantular dari tahanan akan ditindaklanjuti dengan mengundang Tim Pemburu aset yang diketuai Menkumham Amir Syamsudin. Namun Pimpinan DPR ini mengingatkan agar pers menyampaikan informasi Timwas DPR tidak mempertemukan antara KPK dengan Tim Pemburu Aset.

“Kita jadwalkan Rabu pagi pekan depan, Timwas mengundang Tim Pemburu Aset, sorenya kita undang KPK,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi, sejumlah aset milik terpidana kasus Bank Century, Robert Tantular diduga telah dijual, diantaranya aset tersebut berupa tanah dan bangunan kantor Bank Mutiara di Kota Solo, Jawa Tengah. Menurut Kuasa hukum Bank Mutiara, Mahendradatta, aset-asetnya sudah dijual diam-diam dari dalam penjara. Padahal, aset tersebut seharusnya ikut disita untuk mengembalikan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas.

Untuk itu Mahendradatta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan kasus Bank Century sesuai hasil rapat tim pengawas Century DPR pada 5 Juni 2013 lalu. Salah satu kesimpulan rapat adalah tim pengawas Century mendorong KPK untuk menelusuri dan mengembalikan aset-aset Bank Century yang diperoleh dalam kaitan kasus korupsi Bank Century. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Jaksa Agung Diminta Telusuri Dugaan Korupsi di Pertamina dan Merpati

Dugaan korupsi pembelian pesawat MA60 oleh PT Merpati Nusantara serta dugaan *mark up* pembelian BBM jenis premium dan solar oleh Pertamina dan Petral mengemuka dalam rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung. Kasus dengan potensi kerugian negara sangat besar ini, diminta segera ditelusuri oleh aparat kejaksaan.

“Zimbabwe membeli pesawat MA60 ini hanya US\$10juta sedangkan kita US\$16juta. Kerugian negara dalam pembelian ini diperkirakan antara US\$60-70juta. Ini sudah pernah diusut pihak kejaksaan tapi sampai hari ini tidak ada kabar

beritanya, Jaksa Agung perlu lebih serius,” kata anggota Komisi III Nudirman Munir dalam raker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/13).

Ia menyebut pembelian pesawat buatan China ini penuh kontroversi karena pernah ditolak oleh Wapres Jusuf Kalla, namun setelah lengser pembelian dilanjutkan. Politisi FPG ini mempertanyakan kualitas pesawat karena beberapa waktu lalu, dihari dan jam yang sama dua pesawat ini mengalami kecelakaan di Indonesia dan Birma.

Sementara itu anggota Komisi III Syarifudin Sudding mengungkapkan informasi dugaan korupsi dari *mark up* pembelian BBM dari Rusia. “Harga premium dan solar dari Russian Oil hanya US\$425 per metrik ton tapi oleh Pertamina di-*mark up* sampai US\$950dollar. Angka ini yang disebut angka pasar yang mengharuskan subsidi. Jadi mereka merampok disana, me-*mark up* harga, melibatkan elit kekuasaan lalu dibebankan kepada masyarakat,” tandasnya.

“Tolong Pak Jaksa Agung telusuri angka ini lewat Petral dan Pertamina. Saya berikan apresiasi penuh apabila hal ini dapat diungkap karena info ini saya peroleh dari orang dalam. Ini kesempatan bagi kejaksan untuk memperbaiki diri,” kata Sudding yang baru saja terpilih menjadi Ketua Fraksi Hanura.

Jaksa Agung Basrief Arief belum memberikan tanggapan



Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding jabat tangan dengan Jaksa Agung.

terhadap dua permintaan ini. Pimpinan sidang Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin memintanya untuk menyampaikan jawaban secara tertulis. (iky) foto:ry/parle

BAKN Perlu Diperkuat dan Memperkuat Perannya



Ketua BAKN Sumarjati Arjoso.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, melalui peningkatan fungsi pengawasan oleh DPR RI. Salah satunya dengan menganalisa hasil-hasil audit BPK. Selain itu kedepan perlu meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penganggaran di DPR RI. Oleh karena itu BAKN perlu diperkuat dan memperkuat perannya.

Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam Diskusi Publik tentang Menyelamatkan Keuangan Negara yang diselenggarakan BAKN DPR RI pada Kamis (20/6) di Jakarta.

Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso mengatakan bahwa sesuai dengan amanat UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), BAKN DPR RI selama masa sidang

I-IV Tahun 2012-2013 telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya melakukan penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, melakukan rapat konsultasi dan koordinasi dengan BPK, melakukan rapat koordinasi dengan alat kelengkapan DPR RI, serta melakukan raker dan klarifikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Sayangnya, dari hasil telaahan yang telah BAKN rekomendasikan kepada komisi-komisi di DPR terkait permasalahan/temuan BPK pada kementerian/lembaga dengan mitra kerja masing-masing, sebagian besar belum selesai atau belum tuntas proses tindak lanjutnya,”kata Sumarjati.

Jika dalam waktu tiga minggu komisi tidak menindaklanjuti atau belum selesai penindaklanjutan telaahan dari BAKN tersebut, maka BAKN lah yang turun langsung menindaklanjuti dengan mendiskusikan atau membicarakannya dengan kementerian atau lembaga terkait yang tengah ditemukan permasalahan atau penyelewengan.

Ditambahkan mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto yang dalam kesempatan tersebut ikut menjadi pembicara, jika memang dari hasil Proses tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah dilakukan oleh komisi-komisi juga BAKN ditemukan banyak penyelewengan, maka hal tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum.

“Disini kami berharap agar anggota dewan yang seharusnya melakukan pengawasan jangan sampai malah sebaliknya, masuk dalam konspirasi penyelewengan. Oleh karena itu kami berharap agar BAKN dapat diperkuat dan diperkuat fungsinya, sehingga bisa terus bekerja sama dengan BPK melakukan pengawasan kepada kementerian atau lembaga untuk mencegah terjadinya kerugian negara akibat penyelewengan dana dan program,” harap Bibit yang diamini Sumarjati. (Ayu) Foto: wy/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan PM Papua New Guinea, Hon. Peter O'Neill dan rombongan terkait hubungan bilateral kedua negara di gedung Nusantara III DPR RI. Selasa (18/6). Foto: Odjie/Parle.



Rapat Kerja Komisi IX dipimpin Ribka Tjiptaning didampingi Novariyanti Yusuf dan Irgan Chairul Mahfiz dengan Menlu, Menkumham, Wamenag dan Pejabat Kemenakertrans terkait kisruh TKI di Jeddah. Selasa (18/6). Foto: Odjie/Parle.



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti membuka Turnamen Tenis Meja Setjen DPR RI tahun 2013. Jumat (21/6). Foto: Wahyu/Parle.